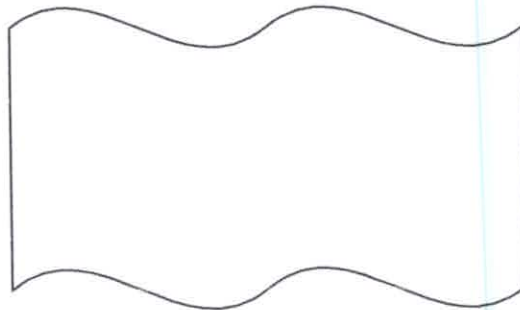
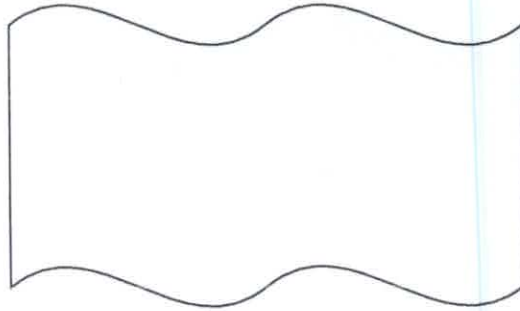


**SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
TAHUN 2023**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Survey Kepuasan Masyarakat ini disusun berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan baik saat pengurusan Izin maupun dengan cara dikunjungi pada tempat usaha dari pelaku usaha.

Dalam penyusunan laporan ini tentu masih banyak kekurangan, sehingga bimbingan dan masukannya sangat kami harapkan. Akhirnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat atas kerjasamanya, semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Waikabubak, 29 Desember 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN SUMBA BARAT**

SAIRO UMBU AWANG, SE

Pembina Utama Muda-IV/c
NIP. 19640414 199203 1 015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	
Maksud dan Tujuan	1
Metode Pengumpulan Data	2
Waktu Pengumpulan Data	2
BAB II CARA PENGOLAHAN DATA	3
Sasaran	3
Ruang Lingkup dan Cara Pengolahan Data	3
Peningkatan Kepuasan Pelanggan	4
BAB III HASIL DAN SARAN	13
BAB IV PENUTUP	15

BAB I PENDAHULUAN

E. Latar Belakang

Pelayanan Publik oleh Aparatur Pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan-kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat yang disampaikan lewat media elektronik maupun media non elektronik. Sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dimana disebutkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 14 tahun 2017. Pedoman ini menggantikan pedoman sebelumnya dalam Permenpan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik maka Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Pelayanan diperlukan pedoman umum yang digunakan sebagai acuan bagi instansi baik itu di Daerah Kabupaten / Kota maupun Pemerintah Pusat.

F. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya dan mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

G. Metode Pengumpulan Data

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sumba Barat sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik, melaksanakan penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat dengan memberikan lembar kuesioner kepada pelaku usaha yang sudah atau pernah mengurus izin pada DPMPTSP Kabupaten sumba Barat.

Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara dilakukan sendiri oleh responden tanpa intervensi dari pihak manapun dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

Pelaksanaan survei serta Pengisian kuesioner dilakukan selama bulan Januari s/d Desember 2023 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 tahun 2017.

BAB II

CARA PENGOLAHAN DATA

D. Sasaran

4. Tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat.
5. Penataan sistem mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas berdaya guna dan berhasil guna.
6. Tumbuhnya kreatifitas prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

E. Ruang Lingkup Dan Cara Pengolahan Data

Pedoman umum ini diterapkan seluruh unit pelayanan instansi pemerintah sebagai instrument penilaian dan evaluasi kinerja pelayanan lingkup instansi pemerintah. Dalam penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) digunakan kuesioner sebagai alat Bantu pengumpulan data. Kuesioner tersebut diisi langsung oleh masyarakat yang berurusan yang di dalamnya terdapat 9 unsur pelayanan.

Setelah kuesioner semua terisi dan terkumpul maka dilakukan pengolahan data untuk mendapatkan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Pengolahan data dilakukan pada awal Desember 2023 (Minggu I Desember 2023). Adapun cara menganalisa kuesioner yang sudah terkumpul adalah dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{NRR per unsur} : \frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{Jumlah kuesioner yang terisi}}$$

NRR tertimbang per unsur : $\text{NRR per unsur} \times 0,071$

SKM Unit Pelayanan : Jumlah kuesioner yang terisi

Keterangan :

NRR : Nilai Rata-Rata

SKM : Survey Kepuasan Masyarakat

Adapun klasifikasi penilaian mutu pelayanan dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 – 1.75	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	1.76 – 2.50	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	2.51 – 3.25	76.61 – 88,30	B	Baik
4	3.26 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Ada 9 unsur pelayanan yang dinilai :

1. (U1) Persyaratan pelayanan
2. (U2) Prosedur pelayanan
3. (U3) Ketepatan waktu pelayanan
4. (U4) Kewajaran Biaya Tarif
5. (U5) Kesesuaian Produk Pelayanan
6. (U6) Kemampuan petugas pelayanan
7. (U7) Kesopanan dan Keramahan
8. (U8) Kualitas Sarana dan Prasarana
9. (U9) Pelayanan Penanganan Pengaduan

F. Peningkatan Kepuasan Pelanggan

Untuk pencapaian sasaran peningkatan kepuasan pelanggan Indikator Kinerja ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada indikator kinerja persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat (Survey Kepuasan Masyarakat) dimana pada tahun 2023 capaian SKM rata-rata mencapai nilai **78,59** yang menunjukkan kualitas pelayanan dalam kategori **Baik**. Indeks ini sekaligus memberi peringatan agar DPMPTSP berusaha mempertahankan kualitas pelayanan publik yang baik pada Masyarakat atau pelaku usaha serta terus berinovasi dengan sarana dan prasarana yang lebih baik pada periode selanjutnya.

BAB III

HASIL DAN SARAN

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, berdasarkan pertimbangan tersebut maka, diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) nomor Kep/14/M.Pan/2017 tentang Pedoman umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Instansi Pemerintah terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Survey Penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di bidang perizinan dan nonperizinan.

Survey Indeks Kepuasan masyarakat menggunakan kuisioner sebagai alat bantu Pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan, kuisioner ini disusun berdasarkan tujuan survey terhadap tingkat kepuasan masyarakat, ada 9 (sembilan) indikator yang menjadi dasar dalam melakukan survey di tahun 2023 yaitu :

1. Persyaratan Pelayanan
2. Prosedur Pelayanan
3. Ketetapan Waktu Pelayanan
4. Kewajaran Biaya Tarif
5. Kesesuaian Produk Pelayanan
6. Kemampuan Petugas dalam memberikan Pelayanan
7. Kesopanan dan Keramahan Petugas pelayanan
8. Kualitas Sarana dan Prasarana
9. Pelayanan Penanganan Pengaduan

Survey dilakukan kepada 123 responden dalam bulan Januari sampai dengan Desember 2023 dimana respondennya yaitu masyarakat yang mengurus dokumen Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumba Barat. Pada tahun 2023 Nilai rata-rata per unsur diperoleh dari Survey Kepuasan Masyarakat yaitu dapat di lihat dari tabel berikut ;

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan Pelayanan	3,16
2	Prosedur Pelayanan	2,97
3	Kecepatan Pelayanan	2,86
4	Tarif Pelayanan	3,09
5	Produk Pelayanan	3,12
6	Kompetensi petugas pelayanan	3,06
7	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3,13
8	Kepastian Biaya	3,89
9	Penanganan Pengaduan	3,30

Dalam melaksanakan tugas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama tahun 2023 ini yaitu dimulai pada bulan Januari – Desember 2023 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

3. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat, secara umum mencerminkan tingkat kualitas Baik. Hal ini terbukti ke-9 unsur pelayanan semua nilai rata-rata pada nilai persepsi 3 (tiga).
4. Target yang ingin dicapai untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 85%, berdasarkan survey yang kita lakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan responden 123 (seratus dua puluh tiga) orang di peroleh hasil nilai IKM, setelah dikonversi (78,59) berada pada interval 76,61 – 88,30, ini dapat disimpulkan bahwa kinerja unit pelayanan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah “Baik”.

Pelaksanaan Pelayanan Hasil yang diperoleh keseluruhan atas hasil survey ini yaitu 90,00 poin yang diklasifikasikan berdasarkan pengukuran keseluruhan kuisisioner yang telah terisi oleh responden terhadap kualitas ruang lingkup pelayanan yang diperoleh dari hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan angka indeks sebesar 90,00 hal ini menunjuk pada kinerja unit Pelayanan PTSP di Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumba Barat

berada dalam Mutu B dan Kategori Baik, hal ini berdasarkan klasifikasi penilaian Permenpan RB yang terdiri dari :

Nilai Persepsi	Nilai Internal (IKM)	Nilai Internal Konversi (IKM)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	1,00-1,75	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	1,76-2,50	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	2,51-3,25	76,61-88,30	B	Baik
4	3,26-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik

Sebagai Mutu Pelayanan yang sangat baik atau bernilai A, tindak lanjut atas hasil survey yang di lakukan diharapkan dapat memberikan pelayanan Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha sehingga peningkatan pelayanan perizinan dapat berjalan dengan mudah, murah, tepat dan berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada prinsipnya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat periode Januari sampai dengan Desember 2023 berada dalam posisi baik dengan capaian SKM mencapai nilai **90,00** Angka ini merupakan hasil kerjasama semua pihak baik pemerintah (penyelenggara layanan dalam hal ini DPMPSTP Kabupaten Sumba Barat), Swasta maupun masyarakat yang mendapatkan layanan.

Berbagai kelemahan serta saran yang disampaikan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan merupakan kontrol bagi kita semua untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang lebih baik.

Waikabubak, 29 Desember 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN SUMBA BARAT**



SAIRO UMBU AWANG, SE
Pembina Utama Madya-IV/c
NIP. 19640414 199203 1 015

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBA BARAT

LAPORAN
TRIWULAN

| 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan I Tahun 2023**" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka terselenggaranya *good governance* dan *clean government*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah telah menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel guna mendukung akuntabilitas.

Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2023 ini berisikan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat yang dilaksanakan selama Triwulan I tahun 2023 sebagai bentuk implementasi konsep Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat tahun 2021 - 2026. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai selama kurun waktu Triwulan I tahun 2023. Selain itu, Laporan Monitoring Kinerja ini juga memuat analisis dan evaluasi untuk meningkatkan perencanaan dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat pada periode berikutnya.

Waikabubak, April 2023

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sairo Umbu Awang, SE
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19640414 199203 1 015

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Bupati. Maka DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat melakukan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis, dan administrasi. Pelaksanaan tugas DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat dalam rangka memenuhi fungsinya untuk (1) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana dan program, pelaksanaan anggaran, pengelolaan Barang Milik Negara, serta evaluasi dan pelaporan; (2) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang undangan, pelaksanaan dokumentasi dan sosialisasi, pemberian pertimbangan Kebijakan ; (3) Penyiapan pelaksanaan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, administrasi perkantoran, kearsipan serta urusan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan umum; dan (4) Penyiapan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, komunikasi dan informasi publik, edukasi, publikasidan dokumentasi, serta pelayanan informasi dan dokumentasi.

Laporan Monitoring Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat Triwulan I Tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat sangat didukung oleh kinerja semua Penata Perijinan.

Pada tahun 2021, DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat melakukan penyusunan konsep Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang memberikan arah kebijakan serta pedoman dalam memetakan prioritas-prioritas pembangunan untuk mencapai indikator kinerja utama DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat, yaitu mewujudkan urusan Penanaman Modal Kabupaten Sumba Barat. Renstra DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, serta pengukuran kinerja, kinerja anggaran, dan kinerja Perangkat Daerah.

DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2023 memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang berorientasi *outcome* dan merupakan *core business* yang menjadi dasar analisis capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat Triwulan I Tahun 2023. Hal ini merupakan tindak lanjut hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Area Akuntabilitas oleh Kemenpan RB yang mengamanatkan bahwa

indikator kinerja harus berorientasi *outcome* dan merupakan *core business* dari DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat.

Selanjutnya, Laporan Monitoring Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat Triwulan I Tahun 2023 berisikan program dan kegiatan bidang penanaman Modal yang dilaksanakan selama Triwulan I tahun 2023 sebagai bentuk implementasi konsep Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target IKK yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai oleh DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat selama kurun waktu Triwulan I tahun 2023. Selain itu, Laporan Monitoring Kinerja ini juga memuat analisis dan evaluasi untuk meningkatkan perencanaan dan kinerja DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat pada periode berikutnya.

1.2. PERJANJIAN KINERJA

DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat untuk tahun 2023 telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun secara berjenjang mengacu pada konsep Renstra DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Pejabat Eselon IV dengan Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon III dengan Pejabat Eselon II, dan Pejabat Eselon II dengan Bupati.

Sasaran program DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome* dari beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat, serta capaian dan permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat pada periode sebelumnya. Selanjutnya, dari satu Indikator Kinerja Program (IKP) dijabarkan menjadi Lima Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
Meningkatnya daya tarik penanaman modal	Jumlah Penanaman Modal / investor	Pelaku Usaha	13
	Realisasi Nilai Investasi	Nilai Investasi	150 M
Meningkatnya kualitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	% jumlah perijinan dan non perijinan yang di terbitkan sesuai SOP yang prima dan responsif	Pelaku Usaha	500
	Jumlah realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN /PMA)	Nilai Investasi	150 M
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pelaku Usaha	400

BAB II DATA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

2.1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat. Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah diidentifikasi agar sasaran program yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 dapat tercapai.

Berdasarkan penetapan target pada setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKU) Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat, berikut adalah pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat pada Triwulan I tahun 2023:

Tabel 2. Capaian Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK 2021	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian
Jumlah Penanaman Modal / investor	Pelaku Usaha	13	3	11	338%
Realisasi Nilai Investasi	Nilai Investasi	150 M	37.500.000.000	75.719456.043	201%
% jumlah perijinan dan non perijinan yang di terbitkan sesuai SOP yang prima dan responsif	Pelaku Usaha	500	125	168	134,4%
Jumlah realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN /PMA)	Nilai Investasi	150 M	37.500.000.000	75.719456.043	201%

Indeks Kepuasan Masyarakat	Pelaku Usaha	400	50	-	8%
----------------------------	--------------	-----	----	---	----

2.1.1. IKK18 Nilai SAKIP DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat

Nilai SAKIP DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat diperoleh dari hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP pada 2 (Dua) Koordinator Jabatan Fungsional di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Barat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Evaluasi terhadap implementasi SAKIP tahun 2023 masih belum selesai dilaksanakan sehingga nilai SAKIP DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat pada Triwulan I masih belum ada. Pada tahun 2022, DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat memperoleh nilai 42,45 dengan predikat C = Cukup

2.1.5. IKK22 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat

Sementara hingga triwulan 2, Indeks Tata Kelola Manajemen ASN masih belum diketahui datanya karena masih menunggu penyelesaian pengisian kuesioner.

2.1.6. IKK24 Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat

Perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IPP dihitung dengan memperhitungkan enam (6) aspek yang meliputi:

- 1) Kebijakan pelayanan;
- 2) Profesionalisme SDM;

- 3) Sarana prasarana pelayanan publik;
- 4) Sistem informasi pelayanan publik;
- 5) Konsultasi dan pengaduan; dan
- 6) Inovasi.

Indeks yang diperoleh dari hasil perhitungan pada tahun 2022 sebesar 42,45 yang dikategorikan C = Cukup Namun dari ke lima aspek tersebut, terdapat penilaian yang tidak optimal dikarenakan jumlah dan kriteria sampel Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) belum mewakili sumber data yang sebenarnya.

2.1.8. IKK25 Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat

Berkaitan dengan Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat, pada saat ini akan dilaksanakan pengisian kuesioner kepada seluruh pegawai di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat.

Adapun unsur-unsur yang menjadi penilaian kualitas penyelenggaraan perkantoran DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat yaitu:

1. Pemenuhan Kebutuhan Kantor
2. Pemenuhan Kebutuhan Daya dan Jasa
3. Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Gedung Kantor
4. Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Mesin Kantor
5. Peningkatan dan Pemeliharaan Perangkat Komputer
6. Pengadaan Barang (Peralatan dan Mesin Perkantoran)

2.2. REALISASI ANGGARAN

Anggaran DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat berdasarkan pagu awal tahun 2022 adalah sebesar 85,96% dan sampai dengan bulan Maret tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.408.106.833,-

Pagu anggaran dan realisasi per Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKK Triwulan I Tahun 2021

Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi TW I	% Capaian
Penunjang Urusan Pemerintahan	1.956.446.248	386.932.589	12
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	51.705.000	0	0
Promosi Penanaman Modal	155.194.600	0	0
Pelayanan Penanaman Modal	490.000.000	0	0
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	519.611.000	0	0
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	59.000.000	0	0

BAB III PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

1. Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan I Tahun 2023 masih belum bisa mencapai target yang ditentukan pada Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan;
2. Meskipun kegiatan-kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan sudah terlaksana, namun realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan I tahun 2023 juga masih kecil, hanya sebesar 12%.

3.2 SARAN

Dari analisis dan permasalahan telah teridentifikasi untuk Triwulan I tahun 2023, berikut beberapa saran yang diberikan agar capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat meningkat pada Triwulan II dan seterusnya:

1. Melaksanakan dan menentukan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja;
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dapat melakukan administrasi terhadap nilai Indikator Kinerja Kegiatan yang nilainya berasal dari pihak eksternal apabila sudah dilakukan penilaian;
3. Mengoptimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan pagu yang tersedia dengan merealisasikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya yang sampai saat ini masih belum terlaksana.

Waikabubak, April 2023

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Sairo Uumbu Awang, SE
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19640414 199203 1 015

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI : Jumat
 TANGGAL : 31 Maret 2023
 TEMPAT : Kantor DPMPSTSP

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SAIRO UMBU AWANG, SE		1
2	YOHANA PANDANGO, SP		2
3	YONATHAN G. KEREMATA, S.Hut		3
4	IVANTINUS W. AGAS, S.Pi		4
5	DANIEL MALO, S.Si		5
6	AGUSTAM, S.Ag		6
7	NOVIANA NURLEILA, S.Pi		7
8	YOHANA TOKO		8
9	YAKUB OEMBOE WARATA		9
10	ADRIANA RAMBU RAUNA, A.Md		10
11	KATHRINA BORA, S.Kom		11
12	DIAH SEPTIANA SUKMASARI, SE		12
13	EDUARDUS DJEHARUM		13
14	CHRISTINA L. PORO, A.md		14
15	NURAZMI SAFITRI HARIS, SE		15
16	MARTHEN MONE		16
17	SEPRIANUS D.A.NGONGO		17
18	ANDI GALLA		18
19	SEINGU UBU LAGE		19
20	BONEFASIUS LALO, S. Sos		20
21	MARIANA WOLEKA		21
22	GRANDIS D. T. LALI, SE		22
23	ARDIANUS MOTO DANGU, S.Sos		23
24	YOHANES MOTO, SH		24
25	BENYAMIN B. UBU RAYA, S.Pt		25
26	MARTEN M. BILI, S.Pd		26
27	AGUSTINA B. W. KABATA		27

Waikabubak, 2023

Kepala Dinas DPMPSTSP,



FOTO - SAAT RAPAT TRIWULAN I





DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI

PERIODE: TRIWULAN I/II/III/IV-AKHIR*

(PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA
BARAT)

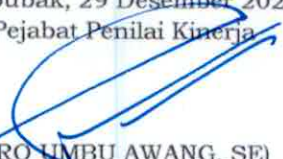
PERIODE PENILAIAN:
2 JANUARI SD 29 DESEMBER 2023

1. PEGAWAI YANG DINILAI	
NAMA	: CHRISTINA LOKU PORO, A. Md
NIP	: 197412202008012016
PANGKAT/GOL. RUANG	: PENATA - III/c
JABATAN	: Analis Kebijakan Ahli Muda
UNIT KERJA	: Dinas Perijinan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	: SAIRO UMBU AWANG, SE
NIP	: 199303182020122004
PANGKAT/GOL. RUANG	: Pembina Utama Muda - IV/c
JABATAN	: Kepala Dinas
UNIT KERJA	: Dinas Perijinan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	: YERMIA NDAPA DODA, S. Sos
NIP	: 196803241999031003
PANGKAT/GOL. RUANG	: Pembina Utama Madya - IV/d
JABATAN	: Sekretaris Daerah
UNIT KERJA	: Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat
4. EVALUASI KINERJA	
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	: BAIK
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	: BAIK
5. CATATAN/REKOMENDASI	

(Waikabubak, 3 Januari 2024)
7. Pegawai yang Dinilai


(CHRISTINA LOKU PORO, A. Md)
(NIP. 197412202008012016)

(Waikabubak, 29 Desember 2023)
6. Pejabat Penilai Kinerja


(SAIRO UMBU AWANG, SE)
(NIP. 199303182020122004)

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRATIF/ JABATAN FUNGSIONAL**

(PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT)

**PERIODE PENILAIAN:
2 JANUARI SD 29 DESEMBER TAHUN 2023**

NO	PEGAWAI YANG DINILAI	NO	PEJABAT PENILAI KINERJA
1	NAMA CHRISTINA LOKU PORO, A. Md	1	SAIRO UMBU AWANG, SE
2	NIP 197412202008012016	2	199303182020122004
3	PANGKAT/GOL. RUANG PENATA - III/c	3	Pembina Utama Muda - IV/c
4	JABATAN Analisis Kebijakan Ahli Muda	4	Kepala Dinas
5	UNIT KERJA Dinas Perijinan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	Dinas Perijinan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HASIL KERJA					
NO.	RENCANA HASIL KERJA ATASAN YANG DIINTERVENSİ	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

A. UTAMA					
1.1	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi Pemantauan Penanaman Modal	Kuantitas	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penanaman Modal yang terlaksana	6 Kegiatan
			Kuantitas	Jumlah Kegiatan Pemantauan yang terlaksana	3 Kegiatan
			Waktu	Waktu Pelaksanaan	6 Bulan
1.2		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal	Kuantitas	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pembinaan Penanaman Modal yang Terlaksana	2 Kegiatan
			Kualitas	-	-
			Waktu	Waktu Pelaksanaan	3 Bulan
1.3		Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Penanaman Modal	Kuantitas	Jumlah Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal yang Terlaksana	3 Kegiatan
			Kualitas	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penanaman Modal yang terlaksana	2 Kegiatan
			Waktu	Waktu Pelaksanaan	5 Bulan

B. TAMBAHAN					

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menanggapi dan memberikan respon bagi ASN yang membutuhkan Bantuan
2	Akuntabel berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menyelesaikan setiap Tugas dan Pekerjaan Tepat waktu sesuai target yang ditetapkan
3	Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Aktif memberikan saran dan informasi, membantu orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan
4	Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan Pelayanan secara baik tanpa membedakan Suku, Ras dan Agama
5	Loyal Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Tidak Melakukan Tindakan yang merugikan diri sendiri dan Organisasi
6	Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: melakukan perbaikan dan perubahan untuk hasil kerja yang lebih baik
7	Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: selalu berdiskusi dan melibatkan orang lain dalam penyelesaian pekerjaan

Pegawai Yang Dinilai

Christina Loku Poro

(CHRISTINA LOKU PORO, A. Md)
(NIP. 197412202008012016)

(Waikabubak, 2 Januari 2023)

Pejabat Penilai Kinerja

Sairo Umbu Awang
(SAIRO UMBU AWANG, SE)
(NIP. 199303182020122004)

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

(PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT)

PERIODE PENILAIAN:

2 JANUARI SD 29 DESEMBER TAHUN 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1	Dalam rangka memenuhi ekspektasi Pimpinan, maka pegawai membutuhkan dukungan pegawai yang memiliki keahlian, Memiliki Komitmen dan mampu bekerja ekstra
2	Dalam rangka memenuhi ekspektasi Pimpinan, maka pegawai membutuhkan dukungan kehadiran pimpinan dalam pelaksanaan tugas dalam memberikan arahan dan bimbingan
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	
1	Hasil kerja dilaporkan setiap bulan dan berikut data yang dilaporkan adalah dalam bentuk Buku Agenda, Buku Jaga dan Buku Pengaduan Masyarakat yang dicatat dengan baik dan rapih
2	
KONSEKUENSI	
1	<i>Apabila Memenuhi Ekspektasi dapat diberikan Penugasan Yang Baru</i>
2	<i>Apabila Tidak Memenuhi Ekspektasi akan dilakukan evaluasi dan dilakukan pembinaan melalui bentuk penugasan yang lain</i>

Pegawai yang Dinilai

(CHRISTINA LOKU PORO, A. Md)
(NIP. 197412202008012016)

(Waikabubak 2 Januari 2023)
Pejabat Penilai Kinerja

(SAIRO UMBU AWANG, SE)
(NIP. 199303182020122004)

**EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRATIF/ JABATAN FUNGSIONAL**

PERIODE: TRIWULAN I/II/III/IV-AKHIR*

(PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT)

PERIODE PENILAIAN:

2 JANUARI SD 29 DESEMBER TAHUN 2023

NO.	PEGAWAI YANG DINILAI	NO.	PEJABAT PENILAI KINERJA
1	NAMA CHRISTINA LOKU PORO, A. Md	1	NAMA SAIRO UMBU AWANG, SE
2	NIP 197412202008012016	2	NIP 199303182020122004
3	PANGKAT/GOL. RUANG PENATA - III/c	3	PANGKAT/GOL. RUANG Pembina Utama Muda - IV/c
4	JABATAN Analisis Kebijakan Ahli Muda	4	JABATAN Kepala Dinas
5	UNIT KERJA Dinas Perijinan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	5	INSTANSI Dinas Perijinan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI*

BAIK

POLA DISTRIBUSI:



HASIL KERJA

NO.	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)

A. UTAMA

1.1	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi Pemantauan Penanaman Modal	Kuantitas	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penanaman Modal yang terlaksana	6 Kegiatan	6 Kegiatan Terealisasi Sesuai Laporan yang disampaikan	Atasan Langsung : Telah Memenuhi Target dan Ekspektasi. Dipertahankan
			Kuantitas	Jumlah Kegiatan Pemantauan yang terlaksana	3 Kegiatan	3 Kegiatan Terealisasi sesuai dokumen yang disampaikan	Atasan Langsung : Telah Memenuhi Target dan Ekspektasi. Dipertahankan
			Waktu	Waktu Pelaksanaan	6 Bulan	6 Bulan Terealisasi Sesuai Rencana Pelaksanaan	Atasan Langsung : Telah Memenuhi Target dan Ekspektasi. Dipertahankan
1.2	0	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal	Kuantitas	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pembinaan Penanaman Modal yang Terlaksana	2 Kegiatan	2 Kegiatan Terealisasi Berdasarkan Laporan yang disampaikan	Atasan Langsung : Telah Memenuhi Target dan Ekspektasi. Dipertahankan
			Kualitas	-	-	-	-
			Waktu	Waktu Pelaksanaan	3 Bulan	3 Bulan Terealisasi Sesuai Rencana Pelaksanaan	Atasan Langsung : Telah Memenuhi Target dan Ekspektasi. Dipertahankan





B. TAMBAHAN

1a							
----	--	--	--	--	--	--	--

RATING HASIL KERJA*

SESUAI EKSPEKTASI

PERILAKU KERJA	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1 Berorientasi pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat disandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menanggapi dan memberikan respon bagi ASN yang membutuhkan Bantuan Catatan Atasan Langsung : Ramah dalam Memberikan Bantuan dan Respon Kepada ASN
2 Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menyelesaikan setiap Tugas dan Pekerjaan Tepat waktu sesuai target yang ditetapkan Catatan Atasan Langsung : Mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu
3 Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Aktif memberikan saran dan informasi, membantu orang Catatan Atasan Langsung : Memberikan masukan dan informasi

4	<p>Harmonis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memebikan Pelayanan secara baik tanpa membedakan</p>	<p>Catatan Atasan Langsung :</p> <p>Selalu memberikan layanan dengan</p> 
5	<p>Loyal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Tidak Melakukan Tindakan yang merugikan diri sendiri dan Organisasi</p>	<p>Catatan Atasan Langsung :</p> <p>Bernal untuk berkata jujur terhdap hal yang tidak seharusnya</p> 
6	<p>Adaptif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>melakukan perbaikan dan perubahan untuk hasil kerja</p>	<p>Catatan Atasan Langsung :</p> 
7	<p>Kolaboratif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>selalu berdiskusi dan melibatkan orang lain dalam</p>	<p>Catatan Atasan Langsung :</p> 
<p>RATING PERILAKU KERJA*</p> <p>SESUAI EKSPEKTASI</p> <p>PREDIKAT KINERJA PEGAWAI*</p> <p>BAIK</p>			

(Waikabubak, 29 Desember 2023)
Pejabat Penilai Kinerja

(SAIRO UMBU AWANG, SE)
(NIP. 199303182020122004)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Weekarou Nomor : - Waikabubak
Telepon /Faks : (0387)2525264 Email : dmptsp.sbkb@gmail.com

WAIKABUBAK

PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT PADA PENILAIAN INTEGRASI

JABATAN FUNGSIONAL YANG DINILAI		
NAMA	CHRISTINA LOKU PORO A.Md	
NIP / NRP	197412202008012016	
NOMOR SERI KARPEG	N 556056	
PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	PENATA /III/c /01-04-2020	
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	SUMBA BARAT 20-12-1974	
JENIS KELAMIN	WANITA	
PENDIDIKAN	D-III	
JABATAN/TMT	Analisis Kebijakan Ahli Muda / 02-01-2022	
MASA KERJA GOLONGAN	16 TAHUN 3 BULAN	
UNIT KERJA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI		
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI
1	2	3
275,000	200,000	75,000

Ditetapkan di : Waikabubak

Pada Tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

SUMBA BARAT

BAIRO UMBU AWANG SE

NIP/NRP. 196404141992031015



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Weekarou Nomor : - Waikabubak
Telepon /Faks : (0387)2525264 Email : dmptsp.sbkb@gmail.com

WAIKABUBAK

PERHITUNGAN KEBUTUHAN KEKURANGAN ANGKA KREDIT

INSTANSI :
PEMERINTAH KAB. SUMBA BARAT

MASA PENILAIAN :
01-01-2022 s.d. 31-12-2022

I		KETERANGAN PERORANGAN
1	NAMA	CHRISTINA LOKU PORO A.Md
2	NIP / NRP	197412202008012016
3	NOMOR SERI KARPEG	N 556056
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	PENATA / III/c / 01-04-2020
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	SUMBA BARAT / 20-12-1974
6	JENIS KELAMIN	WANITA
7	PENDIDIKAN	D-III
8	JABATAN/TMT	Analisis Kebijakan Ahli Muda / 02-01-2022
9	MASA KERJA GOLONGAN	16 TAHUN 3 BULAN
10	UNIT KERJA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT DARI KONVENSIONAL KE INTEGRASI

II		ANGKA KREDIT KONVENSIONAL	ANGKA KREDIT INTEGRASI	
		1	2	
Pendidikan	0,000	Tugas Jabatan	69,000	
Tugas Pokok	200,000	Pengembangan Profesi	6,000	
Pengembangan Profesi	50,000	Unsur Penunjang	0,000	
Unsur Penunjang	25,000	JUMLAH	JUMLAH	75,000
JUMLAH	275,000			

Ditetapkan di : Waikabubak
Pada Tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

SAIRO UMBU AWANG SE
NIP/NRP. 196404141892031015



PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR : DMPTSP.04/53.12/01/2023

INSTANSI : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

MASA PENILAIAN : 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2022

I KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	CHRISTINA LOKU PORO, A. Md		
2	NIP	197412202008012016		
3	Nomor Seri Karpeg	N. 556056		
4	Pangkat/Golongan ruang/TMT	Penata Muda - III/c / 1 April 2020		
5	Tempat dan Tanggal lahir	Sumba Barat, 20 Desember 1974		
	Jenis Kelamin	Perempuan		
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	Diploma - III		
8	Jabatan Fungsional/TMT	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ 02-02-2022		
9	Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA			
	A Pendidikan			
	1) Pendidikan Formal			
	2) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Analisis Kebijakan			
	3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan			
	B Kajian dan Analisis Kebijakan	175.00	25.000	200.000
	C Pengembangan Profesi	25.00	25.00	50.000
2	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Analisis Kebijakan	25.00		25.00
	Jumlah Unsur Penunjang	25.00		25.00
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		225.00	50.000	275.00
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAikkan DALAM JABATAN ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA MUDA TK. I - III/d			

Ditetapkan di : di Waikabubak

Pada tanggal : 3 Januari 2023

Sekretaris Daerah
Kabupaten Sumba Barat,



Yermia Ndapa Doda, S. Sos
Pembina Utama Madya - IV/d
Nip. 196803241999031003

Tembusan

1. Bupati Sumba Barat
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumba Barat



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Weekarou Nomor : - Waikabubak
Telepon /Faks : (0387)2525264 Email : dmptsp.sbkb@gmail.com
WAIKABUBAK

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT

NOMOR : DMPTSP.02/53.12/01/2024

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

PERIODE : 1 JANUARI s/d 31 DESEMBER 2023

PEJABAT FUNGSIONAL YANG DINILAI

1	Nama	CHRISTINA LOKU PORO, A. Md
2	NIP	197412202008012016
3	Nomor Seri Karpeg	N. 556056
4	Tempat/Tgl. Lahir	Sumba Barat, 20 Desember 1974
5	Jenis Kelamin	Perempuan
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda - III/c / 1 April 2020
7	Jabatan/TMT	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ 02-02-2022
8	Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	Instansi	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT

HASIL PENILAIAN KINERJA		KOEFSIEN PER TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT
PREDIKAT	PROSENTASE		
1	2	3	4
BAIK	1.000	25.00	25.000

Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal 5 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja

SAINO UMBU AWANG, SE
PEMBINA UTAMA MUDA - IV/c
NIP. 196404141992031015



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Weekarou Nomor : - Waikabubak
Telepon /Faks : (0387)2525264 Email : dmptsp.sbkab@gmail.com
WAIKABUBAK

AKUMULASI ANGKA KREDIT
NOMOR : DMPTSP.02/53.12/01/2024


PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

PERIODE : 1 JANUARI s/d 31 DESEMBER 2023

1	Nama	CHRISTINA LOKU PORO, A. Md			
2	NIP	197412202008012016			
3	Nomor Seri Karpeg	N. 556056			
4	Tempat/Tgl. Lahir	Sumba Barat, 20 Desember 1974			
5	Jenis Kelamin	Perempuan			
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda - III/c / 1 April 2020			
7	Jabatan/TMT	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ 02-02-2022			
8	Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
9	Instansi	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat			
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
PENILAIAN KINERJA					
TAHUN	PERIODIK (BULAN)	PREDIKAT	PROSENTASE	KOEFISIEN PER TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT
2022	JANUARI-DESEMBER				75.00
2023	JANUARI-DESEMBER	BAIK	1.000	25.00	25.00
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH					100.000

Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal 5 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja


SAING UMBU AWANG, SE
PEMBINA UTAMA MUDA - IV/c
NIP. 196404141992031015



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Weekarou Nomor : - Waikabubak
Telepon /Faks : (0387)2525264 Email : dmptsp.sbkab@gmail.com

WAIKABUBAK

PENETAPAN ANGKA KREDIT INTEGRASI
NOMOR : DMPTSP.04/53.12/01/2023

INSTANSI :
PEMERINTAH KAB. SUMBA BARAT

MASA PENILAIAN :
01-01-2022 s.d. 31-12-2022

I		KETERANGAN PERORANGAN			
1	NAMA	CHRISTINA LOKU PORO A.Md			
2	NIP / NRP	197412202008012016			
3	NOMOR SERI KARPEG	N 556056			
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	PENATA / III/c / 01-04-2020			
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	SUMBA BARAT / 20-12-1974			
6	JENIS KELAMIN	WANITA			
7	PENDIDIKAN	D-III			
8	JABATAN/TMT	Analis Kebijakan Ahli Muda / 02-01-2022			
9	MASA KERJA GOLONGAN	16 Tahun 3 Bulan			
10	UNIT KERJA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT			
		LAMA	BARU	JUMLAH	PERALIHAN
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Kredit dasar yang diberikan	-	-	-	
2.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengalaman	-	-	-	
3.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan	0,000	69,000	69,000	
4.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengembangan Profesi	-	6,000	6,000	
5.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang	-	0,000	0,000	
TOTAL ANGKA KREDIT		0,000	75,000	75,000	
Keterangan		Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi	
Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat/ jenjang		100,000	200,000	6,000	
III	Dapat dipertimbangkan untuk Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi				

ASLI penetapan angka kredit untuk:
Pejabat Fungsional yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Waikabubak
Pada Tanggal : 03 Januari 2023



- Tembusan disampaikan kepada:
1. Bupati Sumba barat
 2. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumba Barat
 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan
 4. Yang Bersangkutan

FOTO KEGIATAN REWAR/PUNISHMENT



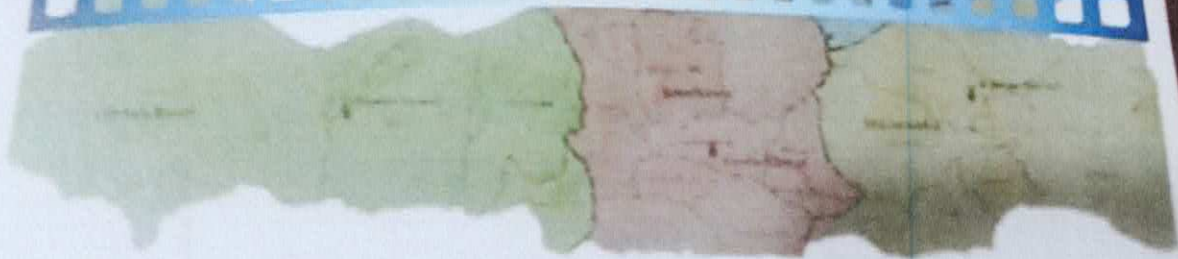
**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2023**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Nilai Akuntabilitas Kinerja			
		2022		2023	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	14,40	30,00	19,80
2	Pengukuran Kinerja	30,00	12,00	30,00	15,90
3	Pelaporan Kinerja	15,00	7,80	15,00	10,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	8,25	25,00	8,25
5	Pencapaian Sasaran			-	
Nilai Akuntabilitas Kinerja			42,45		54,75
			C		CC

No	Catatan
A	Perencanaan Kerja
1	Indikator kinerja belum memenuhi kriteria SMART (Spesifik, Measureable, Achievable, Relevan, Time Bond)
2	Cascading belum dibuat
3	Crusscutting belum dibuat
4	Laporan Kinerja Bidang dan staf belum dibuat
B	Pengukuran Kinerja
1	Belum terdapat Definisi operasional yang jelas atas kinerja
2	SOP/mekanisme pengumpulan data kinerja belum ada
3	Monitoring pengukuran capaian kinerja belum dilakukan secara berjenjang.
4	Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishmant
5	Laporan pengukuran Kinerja Bidang dan staf belum dibuat
C	Evaluasi Kinerja Internal
1	Evaluasi Kinerja Internal belum berdampak dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

No	Rekomendasi
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN SUMBA BARAT



KERJASAMA LPPM UNDANA DENGAN
DPMPSTP KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN 2021

